



# **BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA**



## **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PERBATASAN (KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**

**Oleh:**

**Amrullah Muhd. Ridha**

**Kabid Faslak Monev Asdep Infrastruktur Fisik, Deputi III BNPP**

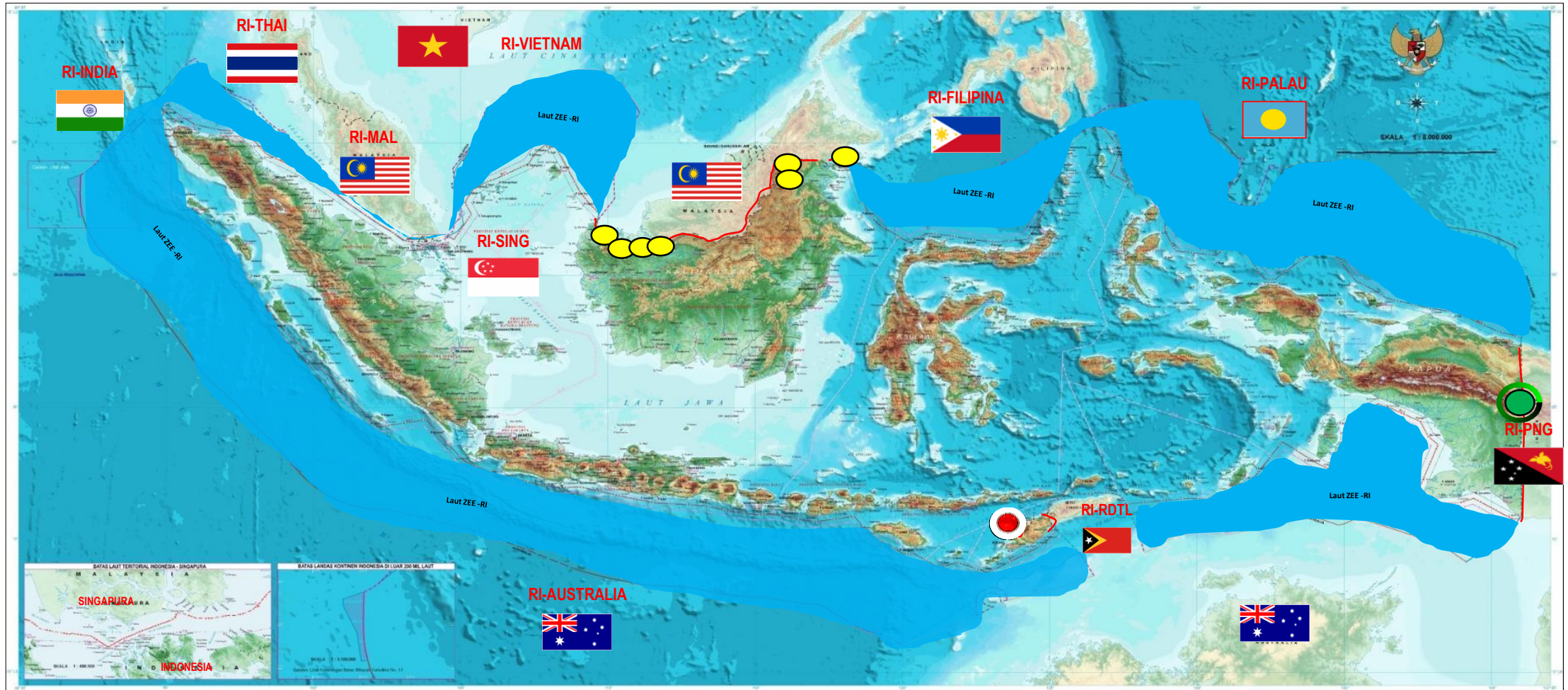
**Bandung, 21 November 2019**



# DASAR HUKUM

1. UU NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 177, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4925)
2. UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH.
3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12/2010 TENTANG BNPP.
4. PP NOMOR 26 TAHUN 2008 TTG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN).
5. PERATURAN PRESIDEN RI NO 31 TAHUN 2015 TTG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DIKALIMANTAN.
6. PERATURAN BNPP NOMOR 1 TAHUN 2015 TTG RENCANA INDUK PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2015-2019.

# Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



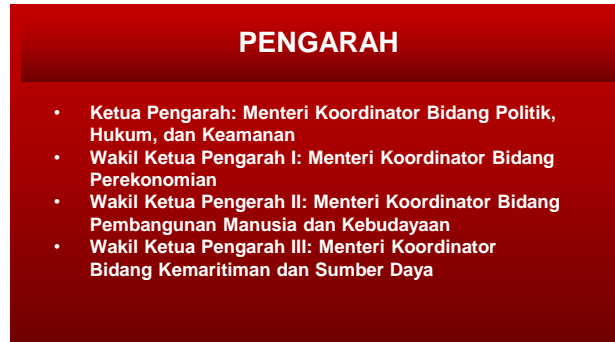
- Panjang Garis Bts.Darat : 3.152 KM
- Panjang Garis Pantai: ± 99.090 KM
- Memiliki 111 PPKT berbatasan langsung dengan Negara tetangga di laut (12 PPKT Rawan Konflik).

- Batas Darat dengan 3 Negara
- Batas Laut dengan 10 Negara

- ☀️ 7 OBP RI-MAL di Kalbar dan Kaltara
- 🔴 2 Unresolved Segment dan 1 Unsurveyed Segment di NTT
- 🟢 Perapatan Pilar Batas/Meridian Monument di Papua

# STRUKTUR ORGANISASI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

(Perpres 44 Tahun 2017 tentang BNPP)



**KEPALA BNPP :  
Menteri Dalam Negeri**

**Anggota**

1. 27 Kementrian / Lembaga
2. 13 Provinsi di Kawasan Perbatasan Negara

**Sekretariat Tetap  
BNPP**

**SEKRETARIS  
BNPP**

Deputi Bidang  
Pengelolaan Batas  
Wilayah Negara

Deputi Bidang  
Pengelolaan Potensi  
Kawasan Perbatasan

Deputi Bidang  
Pengelolaan Infrastruktur  
Kawasan Perbatasan

NO	KEMENTERIAN/LPNK
1	Luar Negeri
2	Pertahanan
3	Hukum dan Ham
4	Keuangan
5	Dikbud
6	Kesehatan
7	Perindustrian
8	Perdagangan
9	ESDM
10	PU PR
11	<b>Perhubungan</b>
12	Kominfo
13	Pertanian
14	LHK
15	Kelautan dan Perikanan
16	Desa, PDTT
17	ATR/BPN
18	Bappenas
19	BUMN
20	KUKM
21	TNI
22	Polri
23	BIN
24	BNN
25	BIG
26	BNPT
27	Bakamla

**Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perbatasan Negara**  
(Perban No. 1 Tahun 2015 ttg Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara)

NO	PROVINSI
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Riau
4	Kepulauan Riau
5	Kalbar
6	Kaltim
7	Kaltara
8	NTT
9	Sulut
10	Maluku
11	Maluku Utara
12	Papua
13	Papua Barat

NO	KAB/KOTA
1	Aceh Besar
2	Serdang Berdagai
3	Rokan Hilir
4	Kota Dumai
5	Bengkalis
6	Kep. Meranti
7	Pelalawan
8	Indragiri Hilir
9	Karimun
10	Kota Batam
11	Bintan
12	Kep. Anambas
13	Natuna
14	Sambas
15	Bengkayang
16	Sanggau
17	Sintang
18	Kapuas Hulu
19	Mahakam Ulu
20	Berau
21	Malinau

NO	KAB/KOTA
22	Nunukan
23	Kupang
24	Timor Tengah Utara
25	Belu
26	Malaka
27	Rote Ndao
28	Alor
29	Sabu Raijua
30	Kep. Sangihe
31	Kep. Talaud
32	MBD
33	MTB
34	Kep. Aru
35	Kep. Morotai
36	Supiori
37	Keerom
38	Pegunungan Bintang
39	Boven Digoel
40	Merauke
41	Raja Ampat

# PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

(Berdasarkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024)

15 Provinsi  
54 Kab/Kota



NO	PROVINSI
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Riau
4	Kepulauan Riau
5	Kalbar
<b>6</b>	<b>Kaltim</b>
7	Kaltara
8	NTT
9	Sulut
10	Gorontalo
11	Sulawesi Tengah
12	Maluku
13	Maluku Utara
14	Papua
15	Papua Barat

NO	KAB/KOTA
1	Aceh Besar
2	Kota Sabang
3	Kota Langsa
4	Serdang Berdagai
5	Batu Bara
6	Rokan Hilir
7	Kota Dumai
8	Bengkalis
9	Kep. Meranti
10	Karimun
11	Kota Batam
12	Bintan
13	Kep. Anambas
14	Natuna
15	Sambas
16	Bengkayang
17	Sanggau
18	Sintang
19	Kapuas Hulu
<b>20</b>	<b>Mahakam Ulu</b>
21	Berau
22	Malinau

NO	KAB/KOTA
23	Nunukan
24	Kupang
25	Timor Tengah Utara
26	Belu
27	Malaka
28	Rote Ndao
29	Alor
30	Sabu Raijua
31	Kep. Sangihe
32	Minahasa Utara
33	Bolaang Mongondow Utara
34	Toli-toli
35	Kepulauan Tanimbar
36	Halmahera Tengah
37	Pulau Morotai
38	Kep. Talaud
39	Kep. Siau Tagulandang Biaro
40	Gorontalo Utara
41	Maluku Tenggara
42	MBD
43	MTB
44	Kep. Aru
45	Mimika
46	Supiori
47	Keerom

NO	KAB/KOTA
48	Pegunungan Bintang
49	Boven Digoel
50	Merauke
51	Raja Ampat
52	Tambora
53	Biak Numfor
54	Sarmi

# Tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan

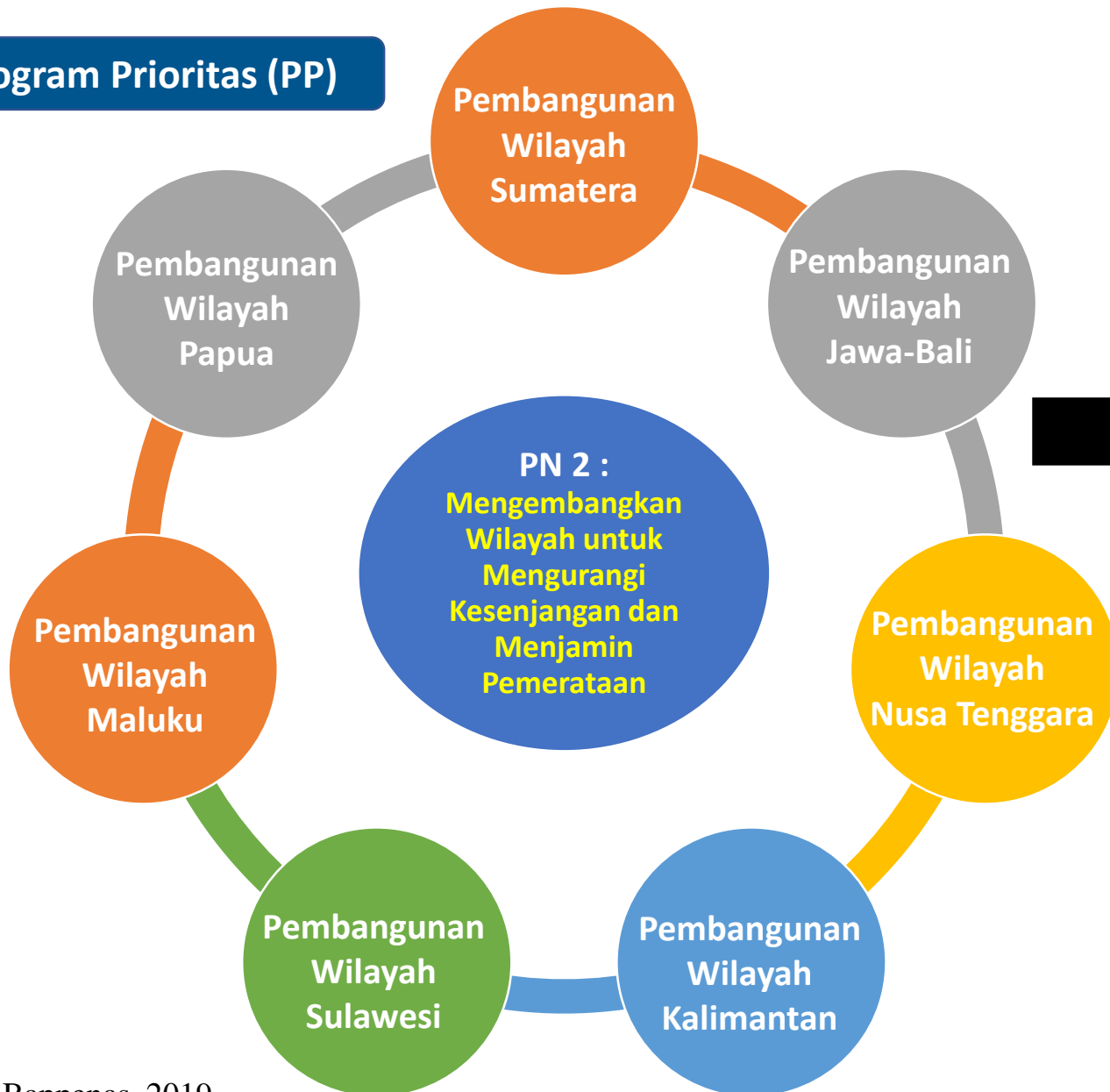
Undang-undang  
Nomor 43 Tahun 2008  
Tentang  
**Wilayah Negara**

Peraturan Presiden  
Nomor 44 Tahun 2017  
Tentang  
**Perubahan Atas Peraturan  
Presiden Nomor 12 Tahun 2010  
Tentang Badan Nasional  
Pengelola Perbatasan**



# PENGELOLAAN PERBATASAN SELARAS MEWUJUDKAN PROGRAM PRIORITAS DAN PRIORITAS NASIONAL

## Program Prioritas (PP)



## Kegiatan Prioritas (KP)

1. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
4. Pemenuhan Pelayanan Dasar
- 5. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Perdesaan**
6. Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Diuraikan di dalam **Major Projects** dan **Proyek Prioritas Nasional** yang didukung oleh Proyek K/L

# ROADMAP RENCANA INDUK PENGELOLAAN PERBATASAN 2020-2024

2020

Peningkatan Ketertiban Masyarakat, Pengembangan Teknologi Informasi Masyarakat, dan penguatan produk lintas batas

Tahap Peningkatan Ketertiban dan Daya Saing

2022

Peningkatan pertahanan dan pengamanan kawasan serta Mewujudkan perluasan permukiman di internal kawasan

Tahap Penguatan Keamanan dan Penataan Kawasan

2024

Tahap Penguatan Kedaulatan

Penanggulangan Jalur Illegal, Pengembangan SDM Terampil dan sarpras produksi, serta **Sarpras Konektivitas lintas batas**

2021

Optimalisasi Diplomasi penyelesaian tata batas negara, dan melakukan ekspansi perdagangan lintas batas, serta penguatan jaringan pertahanan dan struktur sosial-budaya masyarakat

Tahap Ekspansi Kawasan dan Penanggulangan

2023

Persiapan transformasi pertahanan dan keamanan berbasis teknologi informasi, serta diversifikasi ekonomi kawasan perbatasan yang berkelanjutan

Tahap Transformasi Kawasan



# PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR FISIK

## Asdep Infrastruktur Fisik

- **Penyelenggaraan Jalan dan Peningkatan Kapasitasnya (Nasional dan Non Status) → Kementerian PUPR**
- **Listrik dan Energi → Kementerian ESDM**
- **Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran → Kementerian Kominfo**
- **Sarana dan Prasarana Transportasi (*Terminal, Bandara dan Pelabuhan/dermaga*) → Kementerian Perhubungan**
- **Jalan Non Status, Dermaga Rakyat, Tambatan Perahu, Moda Transportasi (Darat, Air) → Kementerian Desa PDTT**

# MITRA K/L ASDEP INFRASTRUKTUR FISIK



1. Jalan/Jembatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten)
2. Abrasi Pantai



1. Energi Listrik
2. BBM Satu Harga



**Sarpras Transportasi  
(Darat, Laut, Udara)**



1. Jaringan Telekomunikasi (BTS dan Akses Internet)
2. Penyiaran (Televisi dan Radio)



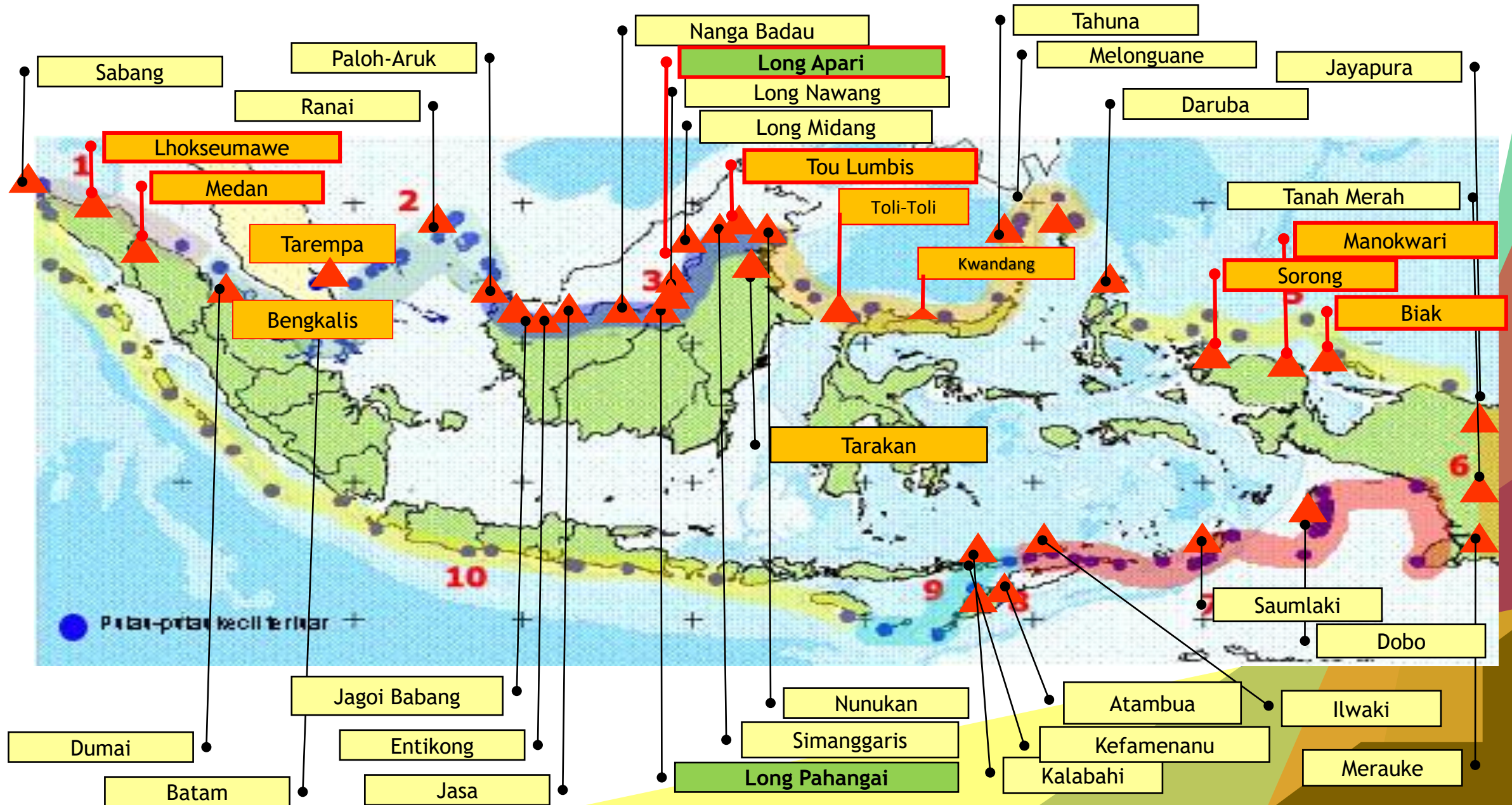
1. Jalan/Jembatan (Non Status/Strategis Desa)
2. Tambatan Perahu
3. Moda Darat
4. Moda Air
5. Jembatan Gantung

## PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) PENGEMBANGAN 2015-2019

(Berdasarkan PP 13/2017 tentang Perubahan Atas PP 26/2008 tentang RTRWN terdapat tambahan 12 PKSN)

10 PKSN Konsentrasi		28 PKSN Tahapan Persiapan Pengembangan			
PKSN Darat	PKSN Laut	PKSN Darat	PKSN Laut		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paloh-Aruk</li> <li>2. Entikong</li> <li>3. Nanga Badau</li> <li>4. Atambua</li> <li>5. Jayapura</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sabang</li> <li>2. Ranai</li> <li>3. Nunukan</li> <li>4. Tahuna</li> <li>5. Saumlaki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jagoi Babang</li> <li>2. Jasa</li> <li>3. Long Nawang</li> <li>4. Long Midang</li> <li>5. Long Pahangai</li> <li>6. Simanggaris</li> <li>7. Kefamenanu</li> <li>8. Merauke</li> <li>9. Tanah Merah</li> <li>10. Long Apari</li> <li>11. Tou Lumbis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dumai</li> <li>2. Batam</li> <li>3. Melonguane</li> <li>4. Kalabahi</li> <li>5. Ilwaki</li> <li>6. Dobo</li> <li>7. Daruba</li> <li>8. Lhokseumawe</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Medan</li> <li>10. Bengkalis</li> <li>11. Terempa</li> <li>12. Tarakan</li> <li>13. Toli-toli</li> <li>14. Kwandang</li> <li>15. Sorong</li> <li>16. Manokwari</li> <li>17. Biak</li> </ol>	

SEBARAN 38 PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN)  
BERDASARKAN PP 13 THN 2017 JO PP 26 THN 2008 TTG RTRWN



# FUNGSI PKSN LONG PAHANGAI DAN LONG APARI (BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN RI NO 31 TAHUN 2015 TTG RTRKPN DIKALIMANTAN)

**A. Long Pahangai sebagai PKSN (Pusat Pelayanan Utama)** memiliki fungsi sebagai:

- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
- b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- c. pusat pelayanan pemerintahan;
- d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- e. pusat perdagangan dan jasa;
- f. pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet;
- g. pusat pengembangan ekowisata;
- h. pusat pengembangan hasil hutan;
- i. pusat pelayanan transportasi udara; dan
- j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

## **B. Sistem Jaringan Transportasi Darat**

- 1. Jaringan Jalan Sejajar Perbatasan (Jalan Pararel)** adalah Jaringan jalan ditetapkan dalam rangka menghubungkan antar pusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara meliputi :
  - a. Putussibau-Nanga Era-Tiong Ohang-Long Pahangai
  - b. Long Pahangai-Long Boh-Long Metulang-Long Nawang;
  
- 2. Terminal penumpang tipe B** yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan meliputi :
  - a. Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur

## Lanjutan...

### **C.Sistem Jaringan Transportasi Laut**

**1. Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:

- a. simpul transportasi sungai di DAS Mahakam pada Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. simpul transportasi sungai di DAS Mahakam, DAS Kayan, DAS Sesayap, DAS Sembakung, DAS Sebuku, DAS Tabul, dan DAS Simanggaris pada Provinsi Kalimantan Utara.

### **D.Sistem Jaringan Transportasi Udara**

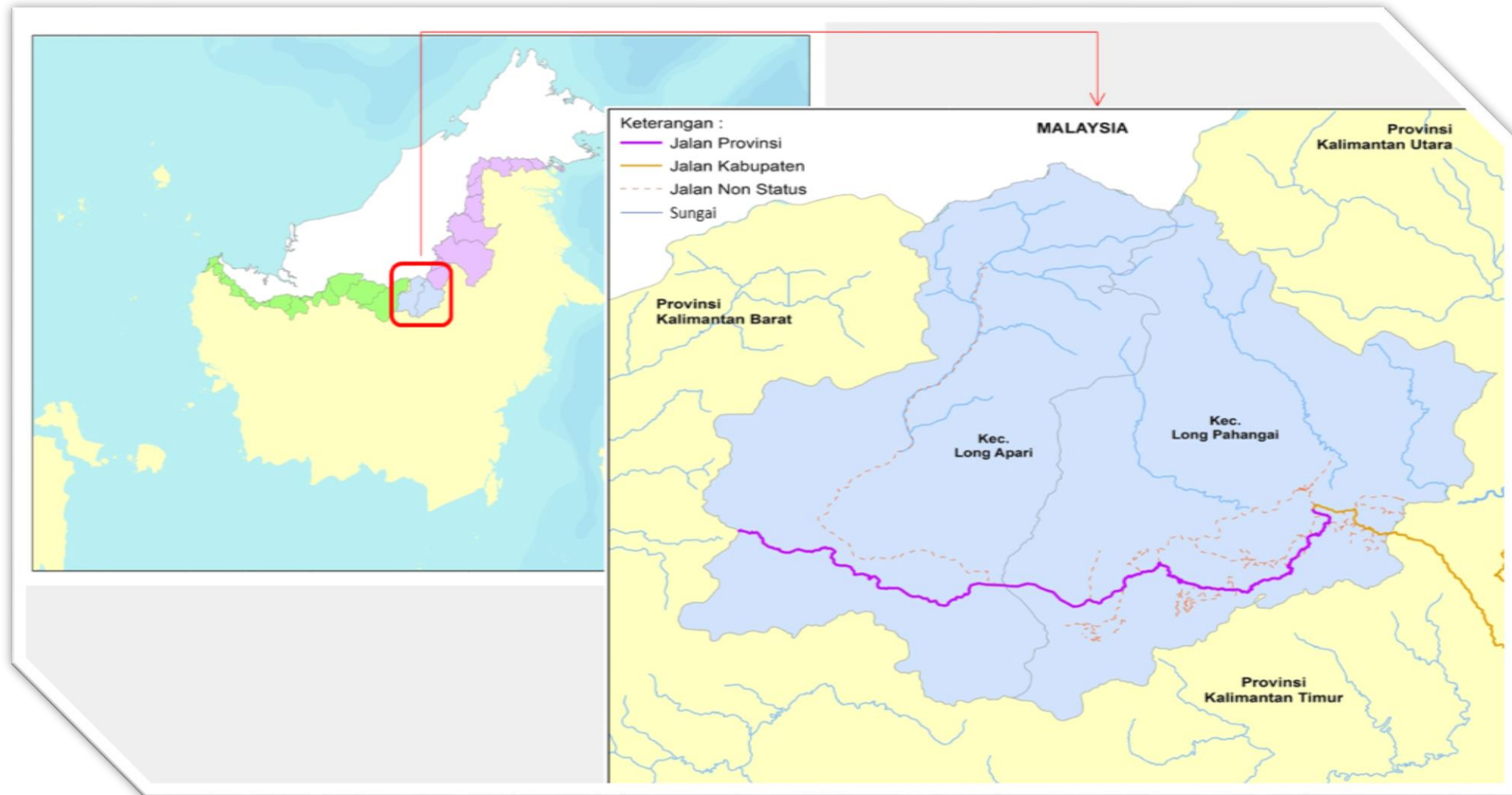
**1. Bandar udara pengumpan** meliputi:

- a. Bandar Udara Datah Dawai di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;

# PETA LOKPRI KABUPATEN MAHAKAM ULU

1. KECAMATAN LONG APARI

2. KECAMATAN LONG PAHANGAI



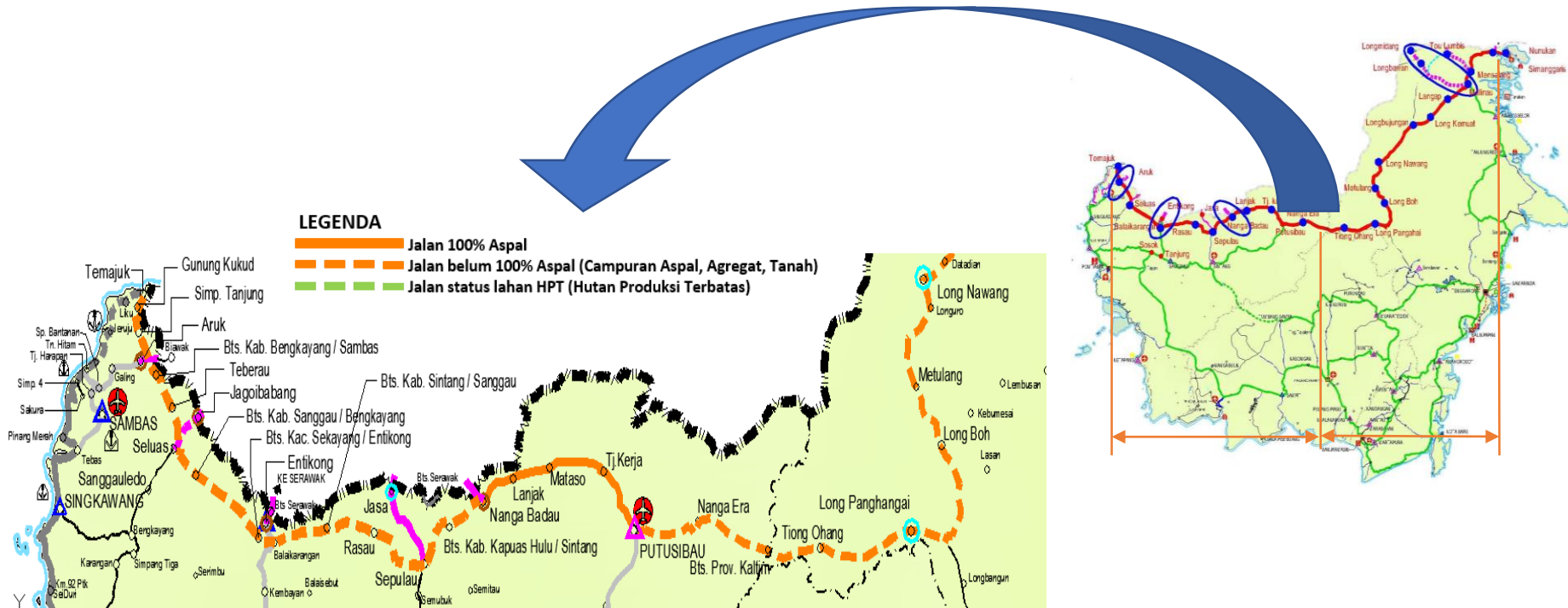


# Peta Jaringan Jalan Kecamatan Long Apari-Kabupaten Mahakam Ulu





# DATA PEMBANGUNAN JALAN PARALEL PERBATASAN DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR



## JALAN SEJAJAR PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Total Jalan Tembus 1.071, 5 Km)

NO.	NAMA RUAS	KONDISI AKHIR 2019	
		AGREGAT	TANAH
1.	Batas Kalbar - Tiong Ohang	15,22	44,57
2.	Tiong Ohang - Long Pahangai	96,69	6,87
3.	Long Pahangai - Long Boh	16,33	63,67
<b>TOTAL (JALAN TEMBUS)</b>		<b>128,24</b>	<b>115,10</b>

Sumber : Status Data P2JN Per 1 April 2019, BPIW

# REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN DAK AFIRMASI PERDESAAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2017-2019 DI KAB. MAHAKAM ULU

NO.	LOKASI (PROV/KAB/KEC)	MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN	DAK AFIRMASI PERDESAAN			TA	KETERANGAN
			MODA DARAT	MODA AIR	DERMAGA RAKYAT		
1.	Prov. Kaltim/ Kab. Mahakam Ulu	Pengadaan moda darat di Kec. Long Bagun	3 unit	-	-	2017	-
2.	Prov. Kaltim/ Kab. Mahakam Ulu	Desa Long Apari (Kec. Tiong Ohang); Desa Long Pahangai (Kec. Long Pahangai)	-	-	2 Unit	2018	-
		Desa Long Bagun, Desa Long Melaham (Kec. Long Bagun)	2 Unit	-	-	2018	-
3.	Prov. Kaltim/ Kab. Mahakam Ulu	Pembangunan Dermaga Wisata Batu Majang (Ds. Batu Majang, Kec. Long Bagun)	-	-	1 Unit	2019	-
		Pembangunan Dermaga Apung & Pos Wasdal Riam Udang (Ds. Bataq Kelo, Kec. Long Bagun)	-	-	1 Unit	2019	-
		Penyediaan Speed Boat Penumpang Untuk Masyarakat Desa (Ds. Ujoh Bilang, Kec. Long Bagun)	-	1 Unit	-	2019	-

# Matriks Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 (Pembangunan Sektor Transportasi di Kabupaten Mahakam Ulu)

## Kementerian Perhubungan

No.	Lokasi/Isu Strategis/Program/Kegiatan	Program/Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan (Tahun 2020)	Volume		Anggaran	Sumber Pembiayaan
			Jumlah	Satuan		
<b>A</b>	<b>KABUPATEN MAHAKAM ULU</b>					
<b>1</b>	<b>LONG PAHANGAI</b>	a Bandara				
	(13 DESA)	Peningkatan/Pemantapan Bandar Udara Datar Dawai	1	Unit		APBN

## Kementerian Desa dan PDTT

No.	Lokasi/Isu Strategis/Program/Kegiatan	Program/Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan (Tahun 2020)	Volume		Anggaran	Sumber Pembiayaan
			Jumlah	Satuan		
<b>A</b>	<b>KABUPATEN MAHAKAM ULU</b>					
<b>1</b>	<b>LONG APARI</b>	a Jalan Akses Menuju Puskesmas				
	(10 DESA)	Peningkatan Jalan dari tanah menjadi aspal di Puskesmas Tiang Ohang	2	Km		
<b>2</b>	<b>LONG PAHANGAI</b>	a Jalan Non Status	144.5	Km		
	(13 DESA)	Pembangunan/Peningkatan Akses Penghubung Jalan Lingkungan Desa Long Lunuk ke Bandara serta Jalan Provinsi	4.8	Km		DAK
		Pembangunan/Peningkatan Akses Penghubung Jalan Lingkungan Desa Delang Kerohong	31.8	Km		DAK
		Pembangunan/Peningkatan Akses Penghubung Jalan Lingkungan Desa Long Lunuk	31.9	Km		DAK
		Pembangunan/Peningkatan Akses Penghubung Jalan Lingkungan Desa Long Pahangai II	21.7	Km		DAK
		Pembangunan/Peningkatan Akses Penghubung Jalan Lingkungan Desa Long Tuyuq	26.8	Km		DAK
		Pembangunan/Peningkatan Akses Penghubung Jalan Lingkungan Desa Naha Aruq	27.5	Km		DAK
		b Jalan Akses Menuju Puskesmas				
		Peningkatan Jalan dari tanah menjadi aspal di Puskesmas Long Pahangai	2	Km		

Sumber : Data Olahan Koordinasi dengan K/L dan PEMDA

# DAK AFIRMASI PERDESAAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2020 DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

2019-

## RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020

DAERAH : Kab. Mahakam Ulu  
 JENIS : Afirmasi  
 BIDANG : 16 - Transportasi Perdesaan  
 SUB BIDANG : 16.01 - Transportasi Perdesaan

Pagu Alokasi Per Sub-bidang : Rp. 5.897.501.000

**A. KEGIATAN FISIK AFIRMASI:**

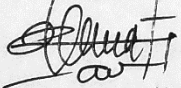
NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
					Volume	Satuan	
1.	16.01.04 - Pembangunan dermaga rakyat Pelaksana: DINAS PERHUBUNGAN	16.01.04.04 - Pembangunan dermaga rakyat	Lelang/Seleksi	6411.010.005 - LAHAM (Kecamatan LAHAM, Desa LAHAM) Komponen:	1	Unit	Rp. 4.778.565.000
2.			Lelang/Seleksi	6411.040.005 - LONG TUYOQ (Kecamatan LONG PAHANGAI, Desa LONG TUYOQ) Komponen:	1	Unit	Rp. 824.060.950
Total Kebutuhan Dana Fisik							Rp. 5.602.625.950

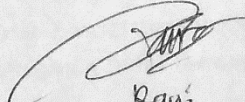
**B. KEGIATAN PENUNJANG AFIRMASI:**

NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
			Volume	Satuan	
1.	Kegiatan Penunjang	16.01.304 - Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Afirmasi)	24	Orang Bulan	Rp. 170.000.000
2.		16.01.305 - Penyelenggaraan rapat koordinasi (Afirmasi)	1	Frekuensi	Rp. 63.791.000
3.		16.01.306 - Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Afirmasi)	1	Frekuensi	Rp. 61.084.050
Total Kebutuhan Dana Penunjang					Rp. 294.875.050

Persetujuan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah dan tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pengusul atas kebenaran data pendukung, program kegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaan fisik dan keuangan.

Disetujui Tanggal ...

Pemerintah Daerah:  
 Dinas Kab. Mahakam Ulu  
*Ka Subid Prasarana*  


Pemerintah Pusat:  
 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
*Wappenas*  
  
 Rayi

Pemerintah Kabupaten:  
 Kabupaten Mahakam Ulu  
*Quik*  
 Diah Ratti  
 NIP. 19690101 149602  
 NIP. (NIP Pejabat)

*Dhepy Randi P*  
 NIP. 19821228 2015051 002

**KETERANGAN:**

- Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per bidang;
- Rincian Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- Metode pengadaan barang/jasa dapat berupa: 1) Lelang/Seleksi; 2) Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung; 3) E-Katalog/E-Purchasing;
- Lokasi Kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, nama sekolah, dll.
- Output Kegiatan diisi dengan volume/besaran dan satuan dari output kegiatan;
- Rincian Kegiatan Penunjang dapat diisi dengan 7 kegiatan yang sudah disepakati dalam batang tubuh Perpres Juknis (tidak wajib)

NO.	LOKASI (PROV/KAB/KE C)	MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN	DAK AFIRMASI PERDESAAN			TA	KETERANGAN
			MODA DARAT	MODA AIR	DERMAGA RAKYAT		
1.	Prov. Kaltim/ Kab. Mahakam Ulu	Pembangunan Dermaga Rakyat (Ds. Laham, Kec. Laham)	-	-	1 Unit	2020	Masuk Pembahasan Finalisasi DAK Afirmasi 2020
		Pembangunan Dermaga Rakyat (Ds. Long Tuyoq, Kec. Long Pahangai)	-	-	1 Unit	2020	Masuk Pembahasan Finalisasi DAK Afirmasi 2020



*Terima Kasih*